

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

JL. PAHLAWAN NO. 14 PAYAKUMBUH, TELP. 0752-92049 FAX.0752-91094



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 00.7.2/264/BUP-LK/IX/2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - b. bahwa penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023;
 - c. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Renja PD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan tujuan sebagai berikut :
- a. Tersedianya satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah (PD) yang memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023;
 - b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
 - c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) PD tahun 2023.
- KETIGA** : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : PENUTUP

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat;
4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;

18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
21. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan;
23. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan;
24. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
26. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan;
28. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
31. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
32. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
33. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Guguk;
34. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
35. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
36. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
37. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Luak;
38. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
39. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
40. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Harau;
41. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
42. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

KELIMA

: Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 29 September 2023

BUNDA LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN IT. BANDARO RAJO

KATA PENGANTAR

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Oleh karena itu perencanaan pembangunan perlu dilakukan dalam kerangka visi, misi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk Tahun 2023.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota. Mudah-mudahan bermanfaat dan diredhai oleh Allah SWT.

Payakumbuh, September 2023

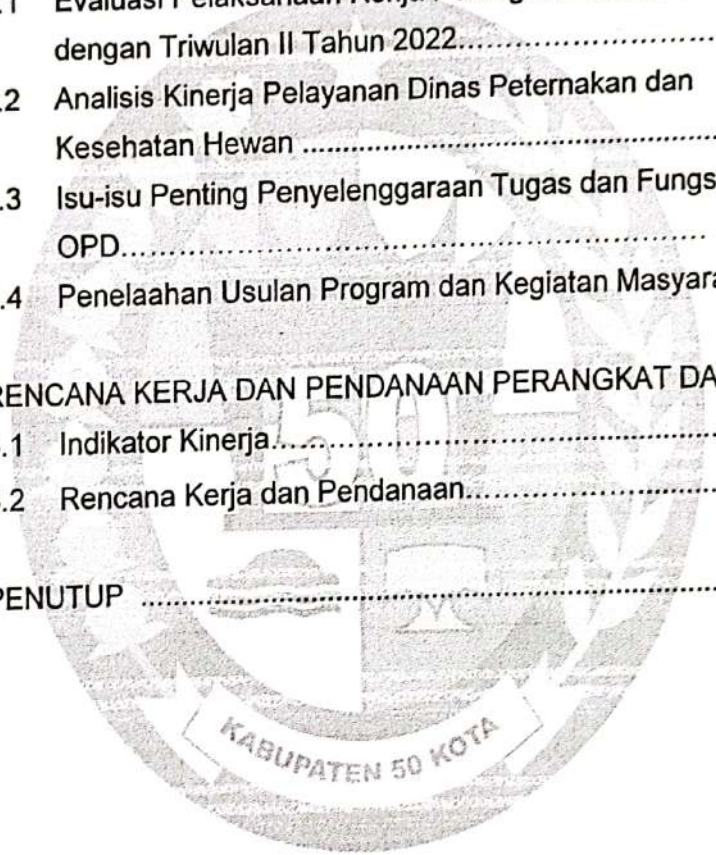
**KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Drh. DEVI-KUSMIRA
NIP. 19751216-200212 2 003

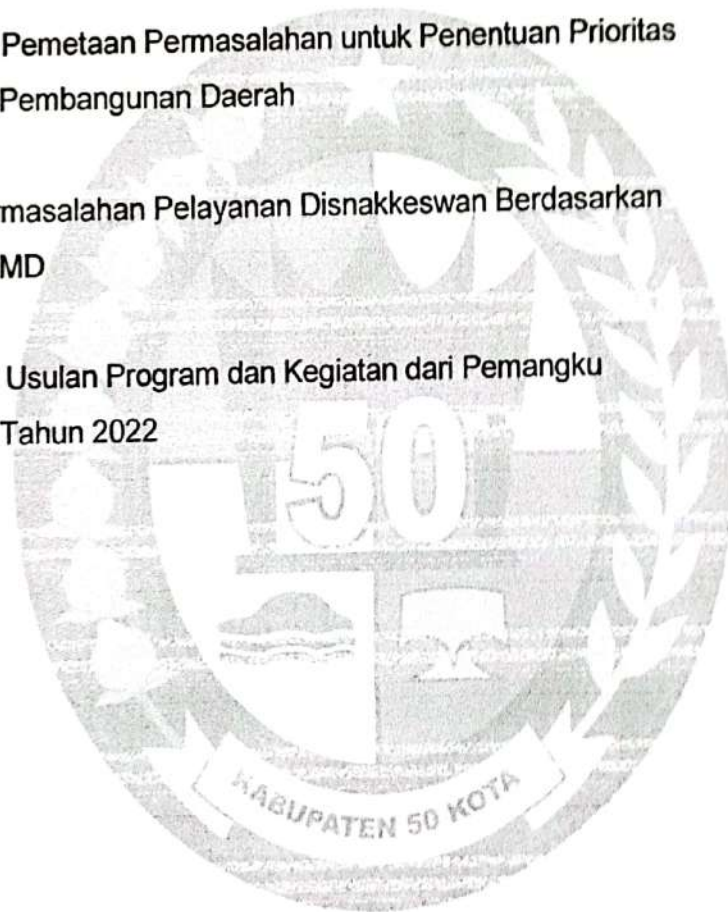
DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	: HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.....	11
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.....	11
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	23
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	27
	2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	45
BAB III	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
	3.1 Indikator Kinerja.....	53
	3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	53
BAB V	: PENUTUP	67



DAFTAR TABEL

1.	Tabel E-81 Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022	12
2.	Tabel T-C.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	25
3.	Tabel T-C.30 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas	26
4.	Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	28
5.	Tabel 2.1 Permasalahan Pelayanan Disnakeswan Berdasarkan Sasaran RPJMD	33
6.	Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022	48



1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Dokumen perencanaan OPD untuk triwulan III dan triwulan IV yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama 6 (enam) bulan dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Perubahan Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Perubahan Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Dokumen Perubahan Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk mensikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Sistem informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan perubahan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun perubahan RKPd dan perubahan Renja OPD, orientasi mengenai Perubahan RKPd dan Perubahan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Perubahan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perubahan RKPd, oleh karena itu penyusunan rancangan Perubahan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Perubahan RKPd, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan Perubahan Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Perubahan Renja OPD untuk

menjadi pedoman dilingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. RKPD ditetapkan dengan Perbup sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPB. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Persiapan penyusunan Perubahan RKPD meliputi :

1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Perubahan RKPD.
2. Orientasi mengenai Perubahan RKPD.
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan Perubahan RKPD
4. Persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD

Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten Lima Puluh Kota.

Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dilatar belakangi oleh penyesuaian sub kegiatan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022, oleh karena itu perlu disusun Perubahan Rencana Kerja sesuai kebutuhan pada triwulan III dan triwulan IV.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga.



11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124.
12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114};
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran mDaerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

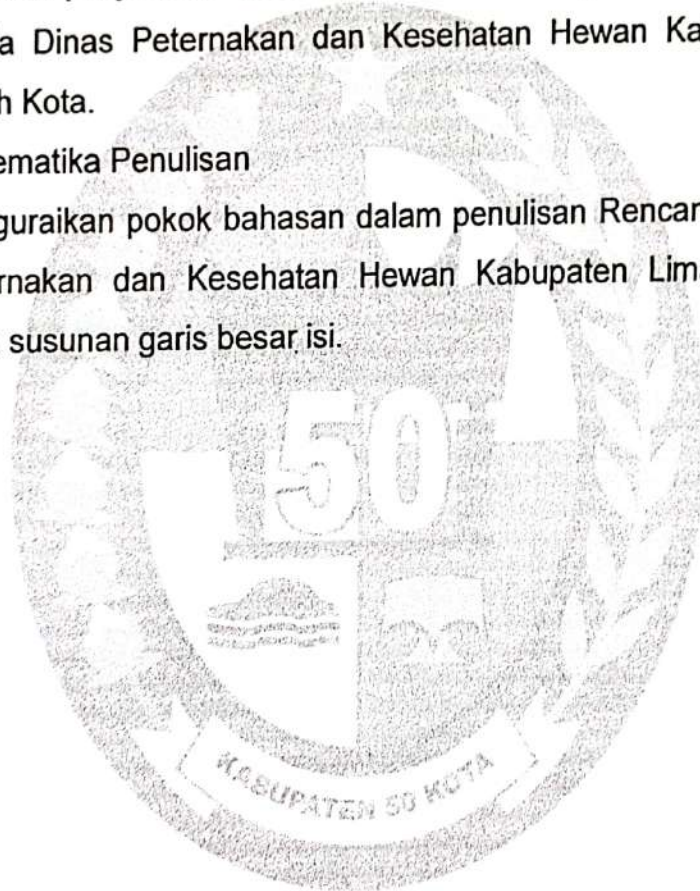
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota serta susunan garis besar isi.



BAB II.HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Pada Sub Bab ini disajikan tabel E.81 sebagai dasar analisis kajian.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Uraikan juga mengenai koordinasi dan sinergi program dengan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah lainnya serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, dll

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
2. pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
3. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Sajikan Tabel T-C.32 "2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Indikator Kinerja

Dalam Sub Bab ini diuraikan perubahan target indikator kinerja apabila target tersebut terpengaruh akibat adanya Refocusing Anggaran. Indikator dan target kinerja dapat berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD dan indikator kinerja lainnya berpedoman pada SPM, NSPK, SDG's dan Indikator Kinerja Daerah yang ada pada Perubahan RKPD 2022.

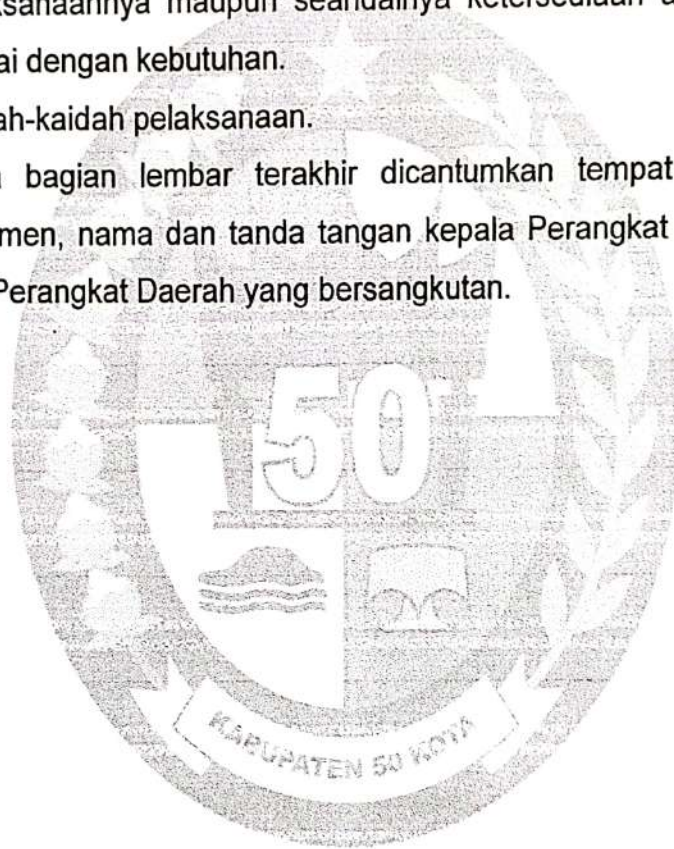
3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Berisi tabel rencana perubahan program dan kegiatan Tahun 2023 yang diambil dari aplikasi SIPD Kemendagri. Agar dipastikan data program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu dana SAMA dengan data Buku II Perubahan RKPD 2023.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Memperhatikan tabel E-81 yakni tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 8.768.400.754,- atau sebesar 45,65% dari Total anggaran yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023. Sesuai dengan persentase realisasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki interval nilai realisasi kinerja kecil dari 50% dengan kriteria penilaian tergolong sangat rendah. Masih sedikitnya realisasi anggaran sampai dengan triwulan II disebabkan karena anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 tidak dialokasikan sesuai dengan anggaran pada Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Realisasi kinerja dan anggaran renstra perangkat daerah s/d tahun 2023 (akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2023) adalah sebesar Rp. 23.158.749.283,-

tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT/OUTPUT)	Target Renja Peringkat Daerah pada Tahun 2028 (Akhir Periode Renja Peringkat Daerah)	REALISASI CAPAIAN KINERJA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 (2023)			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENCANA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA PADA TAHUN BERJALAN TRIWULAN						TINGKAT CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 (%)
					K	RP	RP	K	RP	RP	K	RP	RP	K	RP	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
L	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	PROGRAM PENJULANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pekanbaru, Pangarenga, dan Pelandai Merja Peringkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penjangkuran Pemerintah Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kinerja Peringkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 % 100 % 100 % 100 %	14.312.134,930 48.673.700 10.028.000 1.570.000	6.435.169,654 14.330.000 3.710.000 0	1.244.846.282 0 0 0	2.600.659.488 3.170.000 750.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	12.248.991.190.11 3.748.814.779 0 0	13.949.412 18.397.741.799 81.843.798 13.779.300	14.330.000 14.330.000 14.330.000 14.330.000	15			

Rencana dan Penganggaran Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100 %	22.228.500	3.025.000	1 Dokume n	0	0	0	0	12 Bul an	0	3.025.000	6,13
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/Se mesterian SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trimester/ Semesterian SKPD dan La Koordinasi Keuangan La Bulanan/Trimester/ Semesterian SKPD	100 %	12.570.245	3.130.000	12 Laporan	0	0	0	0	12 Bul an	0	3.130.000	4,05
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100 %	12.570.245	975.000	1 Dokume n	0	0	0	0	12 Bul an	0	975.000	14,48
Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	88.134.388	9.890.000	100 %	0	0	0	0	12 Bul an	0	9.890.000	9,38
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	100 %	10.006.170	1.735.000	1 Dokume n	0	0	0	0	12 Bul an	0	1.735.000	6,11
Koordinasi dan Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	100 %	11.431.600	2.145.000	2 Laporan	0	0	0	0	12 Bul an	0	2.145.000	5,33
Pembinaan dan Pengendalian Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengendalian Barang Milk Daerah pada SKPD	100 %	8.988.100	1.530.000	12 Laporan	0	0	0	0	12 Bul an	0	1.530.000	5,60
Rekonalisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonalisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	100 %	9717030	1.735.000	1 Laporan	0	0	0	0	12 Bul an	0	1.735.000	5,60
Penatausahaan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	100 %	8.700.870	2.445.000	1 Laporan	0	0	0	0	12 Bul an	0	2.445.000	3,56

14 *Revisi Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023*

Administrasi/Kepegawaian/Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi/Kepegawaian/Perangkat Daerah	100 %	1.047.815,12	100%	43.848.000	100 %	4.385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.848.000	24,94
Pengadaan Pakan Diast beserta Alotub Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Alotub Kelengkapannya	100 %	317.550.000		0	100 Paket	0										-	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 %	51.601.875		6.440.000	12 Dokumen	0										6.440.000	8,01
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berbasis Kompetensi dan Fungsinya yang Melalui Pendidikan dan Pelatihan	100 %	152.512.914		37.106.000	4 Orang	4.385.000										37.106.000	4,11
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.405.164,73		814.385,90	100 %	133.608,40	18.745.000	24.417.400	0	0	0	0	0	0	0	857.419,300	6,11
Penyediaan Perlatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	1.207.595,01		84.300.000	10 Paket	0										84.300.000	14,32
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	355.405,135		110.875,10	2 Paket	47.613,100	10.400.000	9.050.000	3	Bulan						130.135.100	2,73
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	177.002,370		39.019,600	2 Paket	16.123,300	4.000.000	4.499.900	3	Bulan						47.519.700	3,72
Penyediaan Bahan Baku dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perundang-undangan yang Disediakan	100 %	15.242.400		4.590.000	240 Dokumen	600.000			3	Bulan						4.590.000	3,32
Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 %	47.632.500		6.487.500	12 Laporan	1.050.000										6.487.500	7,36
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	2.251.286,12		289.203,50	12 Laporan	68.162.000	4.345.000	10.857.500	3	Bulan						284.406.000	7,82

15
 2023
 Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemukiman dan Kesehatan Rumah Kalimantan Lima Puluh Kota Tahun

Pengadaan Barang/ Jasa/ Pemeliharaan/ Penunjang Ususan/ Pemertintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang ususan pemertintah daerah	100 %	0	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengadaan Barang/ Jasa/ Pemeliharaan/ Penunjang Ususan/ Pemertintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang ususan pemertintah daerah	100 %	8.982.314,70	0	0	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 %	2.500.039,39	0	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 %	720.330.000	0	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemertintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Ususan Pemertintah Daerah	100 %	1.165.034,20	0	100 %	318.737,78	91.192,780	0	12.895,164	27.785,082	0	40.480,226	3.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Surat Menyurat	100 %	22.226.500	0	12 Laporan	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	406.236.665	0	99,99 %	97.309.508	54.692,750	0	12.895,164	12.265,002	0	25.180,220	3.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	650.850.480	0	99,99 %	227.419,26	36.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	2.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemertintah Daerah	Tersedianya Barang milik daerah penunjang ususan pemertintah daerah yang terpelihar	100 %	6.615.066,88	0	100 %	769.706,74	190.746,80	0	61.839,047	78.873,260	0	130.713,297	6,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	3.206.619,00	0	100,0 %	513.254,78	121.401,00	0	51.830,047	9.528,750	0	61.387,797	5,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	2.236.225,20	0	2 Unit	80.344.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN SARANA PERTANIAN	Penelitian dan pengembangan sarana pertanian	12 %	20.793.692,3	92	4 %	1.746.613,7	96.164,000	0	10.118,600	80.899,000	0	61.387,800	11,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16 *Peubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025*

Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pembastan PEBastan Pengawasan Sarana Pertanian	12 %	2.429.353.85	137.810.600	25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.810.600	17,83
Pengawasan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	100 %	94.991.807	7.829.700	25 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.829.700	12,13
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100 %	2.334.271,94	129.980,90	25 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.980.900	17,90
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Tembak dan Tanaman Pakan Tembak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit tembak dalam daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	13 %	8.018.860,84	358.421,37	8%	30.400.000	30.400.000	0	0	0	0	0	0	0	358.421.370	15,25
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Tembak, Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Tembak, Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil	100 %	5.765.990,33	293.238,45	36050 Laporan	30.400.000	30.400.000	0	Laporan	0	0	0	0	0	323.639.450	17,82
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Bibit Hajuun Pakan Tembak	Jumlah Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Bibit Hajuun Pakan Tembak yang Beredar	100 %	248.670.512	78.182.920	50 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.182.920	3,29
Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Peredaran Benih/Bibit Tembak, dan Hajuun Pakan Tembak dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Sarana Pertanian	12 %	2.035.884,37	174.928,92	2%	24.384.000	10.033.000	0	0	10.033.000	0	0	0	20.857,50	184.788.420	10,35
Pengawasan Mutu Benih dan Bibit Tembak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Tembak	100 %	64.604.498	58.360.000	12 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.360.000	1,87
Pengendalian Benih/Bibit Tembak dan Hajuun Pakan Tembak	Jumlah Benih/Bibit Tembak dan Hajuun Pakan Tembak yang Tersedia	100 %	1.435.498,00	0	22850 Kg	23.544.000	10.818.500	43 Kg	0	0	20.076.000	20 Kg	0	0	20.097.500	

		Jumlah Pengawasan Produk Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Produk Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	100 %	499.721.972	119.348.020	151 Laporan	760.000	700.000			790.000	119.106.927	4,17
		Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 %	10.144.974,600	373.284,420	99,83 %	8 %	40.450.000	40.450.000	0	0	40.450.000	413.734.429	24,52
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 %	10.100.757,420	148.915,900	155 Ekor		40.450.000	40.450.000	0	0	40.450.000	187.385.909	53,91
		Pengadaan Hewan Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 %	44.217.180	228.308,520	100 Ton		0	0	0	0	0	228.308.520	0,20
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	12 %	42.842.927,985	2.404.657,381	4 %		85.303.000	85.303.000	0	0	85.303.000	2.488.820,381	17,19
		Pembangunan Prasarana Pertanian	12 %	40.885.976,517	2.400.817,361	4 %		85.303.000	85.303.000	0	0	85.303.000	2.488.820,381	14,37
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	100 %	3.324.000,000	800.000,000	3 Unit		0	0	0	0	0	800.000.000	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	100 %	1.952.300,000	149.823,400	2 Unit		0	0	0	0	0	149.823.400	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	100 %	35.709.078,517	1.850.893,981	3 Unit		85.303.000	85.303.000	0	0	85.303.000	1.735.948,981	20,57
		Pengembangan Lahan Pertanian Umum	12 %	1.946.949,386	4.040.000	3%		0	0	0	0	0	4.040.000	481,32

18 Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalian Umum	100 % 1.105.200,00 0	4.040.000	0 Ha Unit: Ha						4.040.000	274,3 1
Pengembalian Lahan Umum		0	0, 2 Ha				0			
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	12 % 23.863.850,2 79	665.420,22 0	2 %	935.149,60 0			0		665.420,220	42,42
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah penyakit Hewan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 % 7.739.268,73 9	188.403,26 0	2 %	1.900,000			0		188.403,260	48,86
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	100 % 5.269.167,83 7	93.062,750 2	2 Laporan	1.900,000			0		93.062,750	59,82
Pembasasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100 % 1.220.033,45 1	59.750,310 5	5 Laporan	0			0		59.750,310	20,42
Penanggulangan Daerah Terdampak wabah Penyakit Hewan Menular	100 % 1.220.033,45 1	5.560.000	2 Laporan	0			0		5.560.000	219,4 3

19
 Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

Pengawasan dan Pengamanan Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan dan Pengamanan Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	12 %	3.500.384,10	27.854.500	2%	760.000	9	27.854.500	123,87
Pemeriksaan dan Pengamanan Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	100 %	1.545.979,473	13.318.100	4 Laporan	0	0	13.318.100	118,10
Pemeriksaan dan Pengamanan Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Perizinan Tebis untuk Pemասասան dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	100 %	1.072.801,394	9.378.400	4 Laporan	760.000	0	9.378.400	114,39
Pemeriksaan dan Pengamanan Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemekasaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 %	881.617,241	5.160.000	1 Laporan	0	0	5.160.000	170,98
Pemeriksaan dan Pengamanan Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 %	9.247.798,067	285.180,00	2%	904.360,00	0	285.180,00	31,33
Pemeriksaan dan Pengamanan Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	100 %	284.074,500	3.900.000	1 Laporan	900000	0	3.900.000	0
Pemeriksaan dan Pengamanan Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100 %	6.963.724,467	291.280,01	12 Laporan	903.450,00	0	291.280,01	32,84
Pemeriksaan dan Pengamanan Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan dan penerangan teknis kesehatan masyarakat masyarakat veteriner	12 %	3.075.484,380	43.198.500	2%	28.439.500	0	43.198.500	71,19
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	100 %	3.008.046,740	71.098.450	12 Laporan	28.139.500	0	71.098.450	42,31
Pengawasan dan Pengamanan Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Pencaran Hewan dan Produk Hewan	100 %	67.447,620	2.868.000	5 Laporan	0	0	2.868.000	23,17

PROGRAM USUHA PERTANIAN			12 %	1.193.270,66	0				4 %	0								43.830.000		0		0	0	0	0	0	0	0	0		27,41
Pembelian Izin Usaha Perikanan dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakti Hewan/Pasar Hewan/Potong Hewan			12 %	1.093.762,82	2				4 %	0								38.890.000		0		0	0	0	0	0	0	0		27,25	
Pencapaian Izin Usaha Perikanan dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakti Hewan/Pasar Hewan/Potong Hewan			100 %	610.964,610					600 Dokumen	0								39.830.000		0		0	0	0	0	0	0	0		15,49	
Pengurusan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan			100 %	44.442,218					600 Dokumen	0								3.900.000		0		0	0	0	0	0	0	0		11,49	
Izin Usaha Pengencer (Toko, Retail, Sub Distributor)			12 %	108.836,528					0,4 %	0								0		0		0	0	0	0	0	0				
Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengencer Obat Hewan			100 %	108.836,528					12 Laporan	0								0		0		0	0	0	0	0	0				
PROGRAM PENTUJUAN PERTANIAN			12 %	6.505.265,87	2				2 %	1.219.824,700								135.381,72		0		0	0	0	0	0	0	0		25,88	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			12 %	6.505.265,87	2				2 %	1.219.824,700								135.381,72		0		0	0	0	0	0	0	0		25,88	

Penjabaran Rincian Kerja Dinas Perikanan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

Peningkatan Kapasitas kelembagaan organisasi pemerintahan di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.203.724,78 8	8.135.000	48 Unit	0	0	0	6.135.000	205,9	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.908.392,83 7	45.217.800	253 Unit	0	0	0	45.217.800	42,20	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.047.530,79 5	40.111.400	34 Unit	700.000	1 Unit	760.000	40.871.400	25,85	
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	423.008,355	43.817.520	39 Unit		0	0	43.817.520	9,85	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	862.808,028	0	13 Unit	1.218.864,7 00		79.276.000			
Total		154.086.616. 880	19.194.430. 013		6.768.400,7 64	1.265.743.782	2.746.997.489	4.602.761. 270	25.188.748. 253	48,88%

Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Pradikat Kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Dukungan SDM Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Faktor Penghambat pencapaian kinerja: seluruh pekerjaan telah selesai, hanya saja terkendala dalam pencapaian dana di beberapa rekening bank

Tindak lanjut yang diperlukan dalam mewujudkan:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka perngkat daerah kabupaten/kota berikutnya:

22
2023
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkududukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

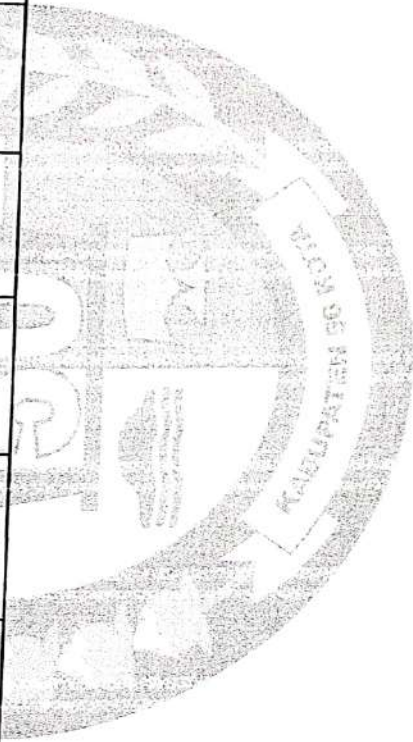
Penetapan Tolok Ukur dan Indikator Kinerja tersebut terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan dengan tabel T-C.30 yang berisikan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Target Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2024 terus meningkat setiap tahunnya dapat dilihat pada table T-C.2 dan tabel Pencapaian Indikator Kierja Utama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibawah ini. Hal ini disebabkan karena target populasi dan produksi ternak pada akhir periode renstra 2021-2026 juga meningkat.



..... PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO.	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK KD dalam RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah / RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn n-2) 2021	Tahu (thn n-1) 2022	Tahun (thn n) 2023	Tahu (thn n +1) 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
1	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB			27,64	28,47	29,31	30,14	26,14	25,43	29,90	30,743	



TABEL T-C.30
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATT ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2024	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan sarana peternakan	2%	4%	6%	8%	2%	4%	6%	8%			
2	Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	2%	2%	2%	8%	2%	2%	6%	8%			
3	Meningkatnya Penyediaan, Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Pertanian dan Pengawasan Perizinan Usaha Peternakan	Persentase Peningkatan, Penyediaan Prasarana Pertanian dan Pengawasan Perizinan	2%	4%	6%	2%	2%	4%	2%	2%			
4	Meningkatkan Kualitas Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Persentase Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian	2%	4%	6%	8%	2%	4%	6%	8%			
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

Penulisan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan OPD

Kebijakan dan strategi dalam membangun peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Pada tahun 2022 Indonesia mengalami suatu pandemi yang menyerang dunia peternakan yang disebut dengan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dimana penyakit ini menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, dan kerbau.

Selain PMK ada beberapa faktor yang dapat mengancam tidak tercapainya produksi pangan asal hewan, yaitu ancaman penyakit hewan, anomali cuaca, peraturan yang kurang mendukung kelestarian usaha peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota serta regulasi import yang kurang berpihak kepada usaha peternakan rakyat.

Koordinasi dan sinergitas dengan kementerian dan dinas pemerintah provinsi yang menangani peternakan tercermin dalam dukungan peningkatan pertumbuhan komoditas peternakan sesuai target Renstra Kementerian Pertanian RI dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Salah satu bentuk sinergitas tersebut adalah Program SIKOMANDAN yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Tahun 2020. Untuk daerah Provinsi Sumatera Barat sendiri, Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu daerah dengan capaian realisasi pelaksanaan program tersebut melebihi target yang diberikan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Kebijakan dan strategi dalam membangun peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Pada Tabel T-B.35 diuraikan faktor-faktor

yang mempengaruhi permasalahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari pelayanan dinas, Renstra Kementerian Pertanian, kajian RTRW dan KLHS.

Tujuan umum pembangunan peternakan adalah untuk peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan, dan peningkatan daya saing produk peternakan. Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan dan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada. Beberapa faktor yang dapat mengancam tidak tercapainya produksi pangan asal hewan adalah ancaman penyakit hewan, anomali cuaca, peraturan yang kurang mendukung kelestarian usaha peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota serta regulasi import yang kurang berpihak kepada usaha peternakan rakyat. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi secara rinci dalam membangun peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel T-B 35.

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya potensi daerah di bidang peternakan	Optimalisasi pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota	Komitmen seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam peningkatan produksi dan produktivitas ternak
2.		Penyusunan RTRW yang kurang mendukung keselarasan usaha peternakan	Keterbatasan penggunaan lahan di bidang peternakan

3.		Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik dalam mendukung fungsi-fungsi pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan
4.		Cuaca dan musim yang ekstrim mengakibatkan fluktuasi produktivitas ternak dan ancaman penyakit menular	Koordinasi dan penentuan kebijakan pembangunan peternakan
5.		Rendahnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewan yang ASUH	Ketersediaan anggaran dan komitmen seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam peningkatan produksi dan produktifitas ternak
6.		Tidak berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat	Peraturan pendukung wilayah pengembangan budidaya peternakan besar dan kecil serta unggas
7.		Fluktuasi harga ternak yang membuat usaha peternakan Rakyat mengalami pasang surut sehingga membuat minat masyarakat untuk beternak rendah	Kurangnya informasi pasar dan peningkatan kualitas produk hasil olahan untuk bersaing dipasaran
8.		Ketersediaan potensi SDA, SDM dalam peningkatan produksi dan produktifitas ternak	Melaksanakan Bimtek
9.		Ancaman penyakit akibat tingginya tingkat lalu lintas ternak	Rendahnya pelayanan kesehatan ternak
10.		Mutu bibit yang masih rendah karena penerapan peraturan perbibitan belum sepenuhnya dilaksanakan	Regulasi
11.		Penyusunan RTRW yang kurang mendukung keselarasan usaha peternakan	Keterbatasan lahan peternakan dan alih fungsi lahan

12.		Tingginya alih fungsi lahan	
13.	Meningkatnya daya saing produk	Keterbatasan bahan baku yang berkualitas	Regulasi untuk pemanfaatan lahan pemenuhan kebutuhan bahan baku
			Lemahnya kelembagaan kelompok baik SDM maupun administrasi kelompok
14	Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS	Pendistribusian ternak ke peternak / kelompok ternak	Belum optimalnya pengelolaan dana bansos pada kelompok ternak yang berkaitan dengan rendahnya kapasitas kelompok dan pola pikir kelompok yang beranggapan Bansos dan Hibah tersebut sebagai bantuan lepas

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan publik dengan 1 urusan, yakni urusan pilihan pertanian dengan 4 bidang yakni Bidang Perbibitan dan Produksi, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan pengolah hasil, Bidang Prasarana dan sarana serta Bidang Penyuluhan. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi sesuai tupoksi adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan bidang Perbibitan dan Produksi Ternak :
 - a. Masih tingginya pemotongan sapi /kerbau betina produktif
 - b. Masih lemahnya pengawasan pelaksanaan Inseminasi Buatan yang dilaksanakan oleh kelompok/swasta maupun aparatur dinas
 - c. Belum optimalnya penyebaran sapi pada masyarakat
 - d. Belum optimalnya pelaksanaan IB(Inseminasi buatan)
 - e. Belum optimalnya pengawasan mutu bibit dan pakan yang beredar.
2. Permasalahan bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Belum tersedianya pos lalu lintas ternak didaerah perbatasan dengan provinsi tetangga.
 - b. Belum tersedianya rumah potong hewan yang representatif

- c. Masih tingginya kasus rabies dan penyakit menular
 - d. Masih tingginya gangguan reproduksi pada ternak sapi.
 - e. Masih terbatasnya tenaga medis dan paramedis dalam pelayanan ke masyarakat.
 - f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah nagari dalam mendukung pemberantasan rabies dan penyakit menular ternak.
 - g. Belum optimalnya pengelolaan produk olahan hasil peternakan
 - h. Belum tersedianya los daging higienis
3. Permasalahan bidang Prasaranan dan sarana
- a. Masih rendahnya pengetahuan peternak dalam pengolahan pakan alternatif dengan sumber limbah pertanian.
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan modal bantuan sosial oleh kelompok penerima.
 - c. Belum terlaksananya tugas dan fungsi kasi lahan dan irigasi dalam pemetaan lahan karena belum tersedianya rekening anggaran pendukung.
 - d. Belum tersedianya los daging higienis
4. Permasalahan pada urusan Penyuluhan
- a. Belum tersedianya buku pintar Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - b. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga peneliti untuk penerapan temuan teknologi
 - c. Belum optimalnya sinergitas kelembagaan dalam pemberdayaan peternak.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

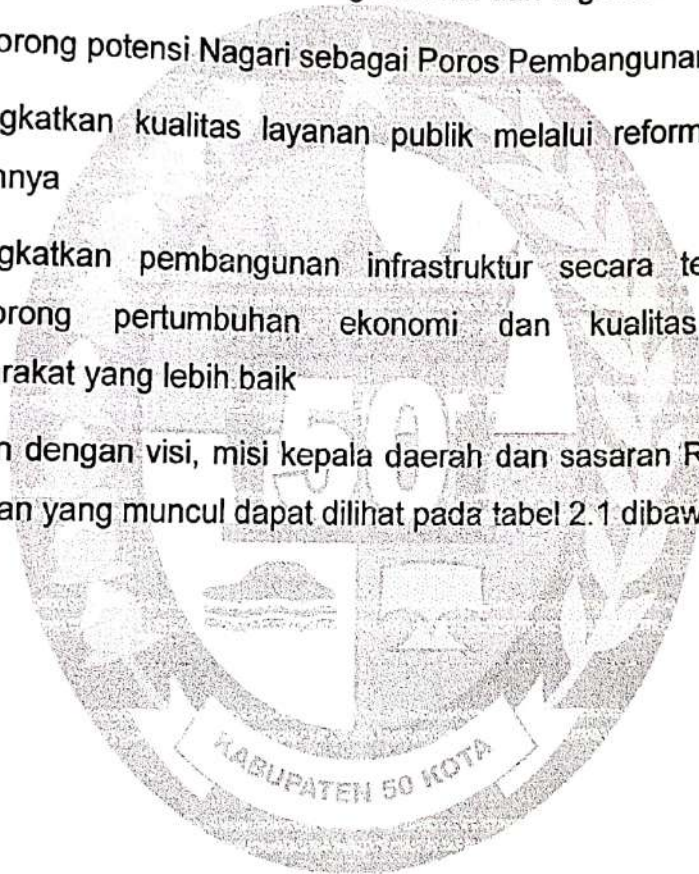
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025 visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah adalah “*Mewujudkan Lima*

Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Rangka Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah”

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Mendorong potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

Sehubungan dengan visi, misi kepala daerah dan sasaran RPJMD maka permasalahan yang muncul dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :



Tabel 2.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional	Kualitas Bibit	Keterbatasan bibit yang berkualitas	Tingginya permintaan bibit mendorong dinas Peternakan Prov untuk menyusun regulasi
2		Rendahnya produksi pangan asal ternak	Keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas lapangan	Pemenuhan tenaga lapangan sesuai dengan persyaratan teknis dan peningkatan kapasitasnya
		Tingginya harga kosentrat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan pada ternak yang berdampak kepada produktifitas ternak	Tingginya harga kosentrat dan ketergantungan terhadap bahan baku impor	Regulasi penyediaan bahan baku pakan ternak

		Rendahnya pelayanan kesehatan ternak dan hewan	Menurunnya status kesehatan ternak	Kapasitas petugas dan sarana dan prasarana yang memadai
		Keterbatasan sarana dan prasarana serta teknologi terapan untuk mendukung produk peternakan	Rendahnya SDM peternak	SDM Peternak untuk memanfaatkan teknologi yang ada
		Lemahnya kapasitas kelembagaan peternak dan penyuluh	Keterbatasan jumlah dan tenaga penyuluh serta kurangnya bimtek untuk kelompok ternak	Peningkatan kapasitas penyuluh, peternak dan kelembagaan

Selain adanya beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota juga ada beberapa faktor penghambat sesuai dengan tabel 2.1 diatas.

2.3.3 Peran Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan terhadap Capaian Nasional

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, dapat berdampak pada tercapainya visi dan misi kepala daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2021 – 2026 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalah dengan melakukan berbagai pembenahan dan peningkatan baik itu

semer daya aparatur, sarana maupun prasarana dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun bentuk kongkrit yang dilakukan sebagai berikut :

1. Menjalin kerjasama integritas dengan Kementrian Pertanian melalui Program Sikomandan (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pencapaian angka populasi dan produksi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Inseminasi Buatan dan pelayanan kesehatan hewan kepada Masyarakat .
3. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, kelompok tani ternak serta peternak dalam lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Menjalankan fungsi UPTD Pembibitan dan Pakan ternak sebagai batu loncatan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal meningkatkan populasi dan produksi ternak.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Tantangan dan peluang merupakan faktor yang berasal dari luar/eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Peteranakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun tantangan dan hambatan dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Tantangan
 - a. Penanganan dampak pandemi PMK
 - b. Persaingan dan liberalisasi pasar
 - c. Ketergantungan pakan impor
 - d. Pengarus iklim yang berpengaruh pada pengadaan pakan dan kesehatan hewan
 - e. Adanya ancaman penyakit hewan eksotik sebagai akibat mobilitas hewan yang tidak terkendali
 - f. Penurunan angkatan kerja sektor peternakan

- g. Alih fungsi lahan peternakan
2. Peluang
- a. Pasar Produk Peternakan
 - b. Adanya kesadaran global (food safety, biosecurity, kesejahteraan hewan dan kualitas lingkungan)
 - c. Perkembangan teknologi yang canggih
 - d. Meningkatkan jumlah investor bidang peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.3.5 Formulasi Isu-isu Penting

Dari berbagai permasalahan yang timbul, beberapa isu-isu strategis sebagai catatan penting yang direkomendasikan untuk dilakukan di tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan program dan kegiatan yang sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka mekanisme manajemen internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota harus ditingkatkan, pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan.
2. Agar implementasi sistem akuntabilitas kinerja benar-benar efektif, maka diperlukan sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senantiasa berkoordinasi dengan Stakeholder yang dimulai pada saat perencanaan untuk kebutuhan SDM dan sarana prasarana sampai pada pelaksanaan kegiatannya.

4. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang disesuaikan dengan bidang tugasnya.
5. Dukungan melalui pembangunan sarana prasarana pendukung pelayanan.
6. Implementasi reward dan punishment yang adil dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur.
7. Peningkatan pembinaan kelembagaan petani, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM peternak / petani.
8. Peningkatan aksi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular, hal tersebut dilakukan melalui kegiatan pemusnahan ternak yang terjangkit endemik, pengawasan perdagangan ternak antar daerah.
9. Peningkatan produksi hasil peternakan,hal tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak, Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak, Penelitian dan pengolahan gizi pakan ternak, Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak, dan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan.
10. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
11. Peningkatan penerapan teknologi peternakan dimana hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna, serta pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.

Sehubungan dengan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka tugas dan fungsi (sesuai dengan program dan kegiatan) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terkait dengannya, sebagaimana tabel dibawah ini:

Program/Kegiatan	Misi pada RPJM	Ket
<p>I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran 	<p>Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional</p>	

SKPD

- C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya
 - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

<p>F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pengadaan Mebel c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya <p>G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 		
<p>II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>A. Kegiatan Pengawasan Penggunaan sarana Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian <p>B. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta</p>	<p>Sda</p>	

<p>Pakan dalam Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil b. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak <p>C. Kegiatan Pengawasan Obat di Tingkat Pengencer</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan b. Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan <p>D. Kegiatan Pengedaran dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak b. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak c. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan <p>E. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota Lain b. Pengendalian Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 		
<p>III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p>	<p>Sda</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya b. Kegiatan Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum 		
<p>IV. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian dan Penanggulangan penyakit Hewan dan Zoonosis b. Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota c. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit hewan Menular B. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Kemanaan Produk Hewan b. Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan c. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota C. Kegiatan Pengelolaan Pelayan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik 	<p>Sda</p>	

Veteriner dalam Daerah
Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
 - b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik veteriner
- D. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
- a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
 - b. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

**V. Program Perizinan Usaha
Pertanian**

Sda

- A. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
- a. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - b. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
 - c. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
- B. Kegiatan Izin Usaha Pengencer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengencer Obat Hewan

VI. Program Penyuluhan Pertanian

A. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- a. Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- d. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
- e. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani tingkat Kabupaten/Kota

Meningkatkan taraf/ hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis

pemamfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan

serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber

daya alam lainnnya,dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi

Kerakyatan, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Gerakan Usaha Dini Mandiri,

serta gerakan Pemberdayaan Perempuan, Gerakan Sayang Jumpo. Bank Tanah Nagari, Usaha Ekonomi Produktif Pemuda.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan para pemangku kepentingan, pada tahun anggaran 2023 telah tertampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota setelah melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Usulan Kebutuhan masyarakat Nagari dan Kecamatan maupun Reses Dewan diusulkan melalui Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD).
- b. Usulan tersebut diverifikasi di tingkat OPD dan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota selama usulan tersebut mendukung IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota
- c. Seluruh usulan yang lolos verifikasi telah diakomodir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

Usulan Program dan Kegiatan terdiri dari Usulan Musrenbang dan reses Dewan yang di sesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota melalui kamus usulan Tahun 2023. Usulan reses Dewan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.32 dibawah ini, dimana tabel T-C.32 disesuaikan dengan usulan Reses Dewan yang tertuang di dalam DPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.

Program yang mendukung isu-isu strategis pada tahun 2023 dapat diurai sebagai berikut :

Program	Isu-Isu Strategis	Ket
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Mengoptimalkan program dan kegiatan yang sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka mekanisme manajemen internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota harus	

	<p>ditingkatkan, pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Agar implementasi sistem akuntabilitas kinerja benar-benar efektif, maka diperlukan sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcome kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.3. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senantiasa berkoordinasi dengan Stakeholder yang dimulai pada saat perencanaan untuk kebutuhan SDM dan sarana prasarana sampai pada pelaksanaan kegiatannya.4. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang disesuaikan dengan bidang tugasnya.5. Dukungan melalui pembangunan sarana prasarana pendukung pelayanan.6. Implementasi reward dan punishment	
--	--	--

	yang adil dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur.	
II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Peningkatan produksi hasil peternakan, hal tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak, Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak, Penelitian dan pengolahan gizi pakan ternak, Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak, dan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan.	
III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Peningkatan penerapan teknologi peternakan dimana hal tersebut dilakukan melalui kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna, serta pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.	
IV. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2. Peningkatan aksi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular, hal tersebut dilakukan melalui kegiatan pemusnahan ternak yang terjangkit endemik, pengawasan perdagangan ternak antar daerah. 3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	
V. Program Penyuluhan Pertanian	1. Peningkatan pembinaan kelembagaan petani, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM peternak / petani.	

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah

: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Cata
1	Program Penyuluhan Pertanian				
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Tunas Baru	Pengadaan ternak Kambing + SL 2 pertemuan	7 ekor	
		Jr. Pincuran Tinggi, Nag. Mungo, Kec. Luak			
		Suka Maju	Pengadaan ternak Kambing + SL 2 pertemuan	7 ekor	
		Jr. Pincuran Tinggi, Nag. Mungo, Kec. Luak			
		KWT Pandan Wangi	Pengadaan ternak Kambing + SL 2 pertemuan	7 ekor	
		Jr. Pincuran Tinggi, Nag. Mungo, Kec. Luak			
		KWT Luak Limau	Pengadaan ternak Kambing + SL 2 pertemuan	7 ekor	
		Jr. Bukik Gombak Situak, Nag. Mungo, Kec. Luak			
		KWT Mawar Serumpun	Pengadaan ternak Kambing + SL 2 pertemuan	7 ekor	
		Jr. Bukik Gombak Situak, Nag. Mungo, Kec. Luak			

No	Program/Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja Masyarakat
		Sumber Rezeki	Jr. Bukik Gombak Situak, Nag. Mungo, Kec. Luak	
		Sederhana	Jr. Talaweh, Nag. Mungo, Kec. Luak	Pengadaan ternak Kambing + SL 2 pertemuan 7 ekor
		Mekar Indah	Jr. Talaweh, Nag. Mungo, Kec. Luak	Pengadaan ternak Kambing + SL 2 pertemuan 7 ekor
		Suka Damai Mandiri	Jr. Talaweh, Nag. Mungo, Kec. Luak	Pengadaan ternak Kambing + SL 2 pertemuan 7 ekor
		KWT Bunga Tanjung	Jr. Indobaleh Timur, Nag. Mungo, Kec. Luak	Pengadaan ternak Kambing + SL 2 pertemuan 7 ekor
		KWT Anjalai	Jr. Balai Gadang Bawah, Nag. Mungo, Kec. Luak	Pengadaan ternak sapi + SL 2 pertemuan 1 ekor
		Taruna Kreatif	Jr. Balai Gadang Bawah, Nag. Mungo, Kec. Luak	Pengadaan ternak sapi + SL 2 pertemuan 1 ekor
		Andeslegusa II	Jr. Indobaleh Barat, Nag. Mungo, Kec. Luak	Pengadaan ternak sapi + SL 2 pertemuan 1 ekor
		Merpati Putih	Jr. Batu Labi, Nag.	Pengadaan ternak sapi + SL 1 ekor

19
 Penelitian Riset dan Dampak Peternakan dan Kesehatan Ruminansia Kabupaten Luak Pada Kota Tabek
 2022

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Mungo, Kec. Luak	2 pertemuan		
	Fajar Menyingsing	Jr. Balai Gadang Ateh, Nag. Mungo, Kec. Luak	Pengadaan ternak sapi + SL 2 pertemuan	1 ekor	
	KWT Taruko Indah	Jr. Kayu Bajajar Padang Laweh, Nag. Mungo, Kec. Luak	Pengadaan ternak sapi + SL 2 pertemuan	1 ekor	
	Bungo Tanjung	Jr. Bukik Gombak Situak, Nag. Mungo, Kec. Luak	Pengadaan ternak sapi + SL 2 pertemuan	1 ekor	
	Lembah Sago	Jr. Bukik Gombak Situak, Nag. Mungo, Kec. Luak	Pengadaan ternak sapi + SL 2 pertemuan	1 ekor	
	KWT Burai Indah	Jr. Koto Tuo, Nag. Mungka, Kec. Mungka	Pengadaan ternak ayam + SL 2 Pertemuan	400 ekor	
	Ambacang Permai	Jr. Koto Malintang, Nag. Batu Payuang, Kec. Lareh Sago Halaban	Pengadaan ternak sapi + SL 2 pertemuan	1 ekor	
	Saiyo Sakato	Jr. Padang Belimbing, Nag. Bukik Sikumpa, Kec. Lareh Sago Halaban	Pengadaan ternak sapi + SL 2 pertemuan	2 ekor	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Pengadaan ternak sapi + SL	Volume
	Saiyo Sakato	Jr. Kubang Rasau, Nagari Balai Panjang, Kec. Lareh Sago Halaban	Pengadaan ternak sapi + SL 2 pertemuan	2 ekor
	Harapan	Jr. Baruah Gunung II, Nag. Baruah Gunung, Kec. Bukik Barisan	Pengadaan ternak sapi + SL 2 pertemuan	2 ekor
	Tani Sakato	Jr. Baruah Gunung I, Nag. Baruah Gunung, Kec. Bukik Barisan	Pengadaan ternak sapi + SL 2 pertemuan	2 ekor
	Puncak Jaya	Jr. Bukik Kambulk, Nag. Baruah Gunung, Kec. Bukik Barisan	Pengadaan ternak kambing + SL 2 Pertemuan	7 ekor
	Melati I	Jr. Padang Bungo, Nag. Andiang, Kec. Suliki	Pengadaan ternak Sapi + SL 2 Kali	2 ekor
	Sago Pratama, Elok Basamo, Harapan Mulya, Lereng Sago, Ika Puncak Sago	Nag. Sungai Kamuyang, Kec. Luak	SL 2 Kali pertemuan	
	Putra Tujuh, Baruah	Nag. VII Koto Talago, Kec.	SL 2 Kali pertemuan	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Anduriang Sepakat, Multi Agro Jaya	Guguk			
	Sakinah, Melayu Sepakat, Bukik Palano Sakato, facilla	Nag. Taram, Kec. Harau	SL 2 Kali pertemuan		
	Karya Bersama, KWT Tirta Bening, Karya Saiyo, Kampuang Tarandam	Nag. Baruah Gunuang, Kec. Bukik Barisan	SL 2 Kali pertemuan		
	Batang Sinama, KWT Wirajaya	Kec. Harau	SL 2 Kali pertemuan		
	Bukik Jambu, KWT Daladang, KWT Muaro Saiyo, Buah Jerami	Kec. Harau	SL 3 Kali pertemuan		
	Piliang Jaya, Simpatic, Sei Kolam, Tuah Sakato	Kec. Lareh Sago Halaban	SL 2 Kali pertemuan		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu :

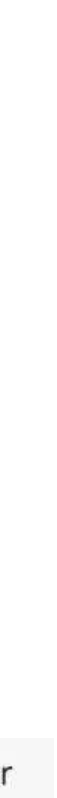
1. Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan sarana peternakan
2. Persentase Peningkatan, Penyediaan Prasarana Pertanian dan Pengawasan Perizinan
3. Persentase pelaksanaan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
4. Persentase Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Persentase Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian
5. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Target indikator kinerja pada RKPD tahun 2023 mengalami perubahan pada Perubahan RKPD Tahun 2023, hal ini disebabkan karena terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota satu-satunya Sub Kegiatan yang termasuk dalam keputusan tersebut adalah Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan pada perubahan RKPD tahun 2023 telah disesuaikan pada Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
			Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan			Program		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target				
							Sebelum	Setelah									Sebelum	Setelah	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3																	31,886,909,376		
3	27																13,027,204,244		
3	27	01															40,718,300		
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
3	27	01	2.01		Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	6,005,000	3,710,000	7,257,500
3	27	01	2.01	01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100 %	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	6,005,000	3,710,000	7,257,500
3	27	01	2.01	02	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100 %	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	1,680,000	0	3,620,000
3	27	01	2.01	03	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100 %	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	2,110,000	0	3,695,000
3	27	01	2.01	04	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100 %	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	2,015,000	0	3,681,500
3	27	01	2.01	05	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100 %	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	2,525,000	435,000	3,914,300



Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program		Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tingkat Capaian Kinerja		Sambutan Dana	Catatan	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja		
		Kedua	Sub Kegiatan		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah						Sebelum	Setelah
3 27 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	100 %	100 %	24 Laporan	24 Laporan	100 %	100 %	10.245.000	10.245.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10.750.000
3 27 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	1.975.000	1.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10.750.000
3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	100 %	100 %	6.798.753.719	6.000.847.904	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10.750.000
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	50 Dokumen	50 Dokumen	100 %	100 %	2.440.000	2.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10.750.000
3 27 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	100 %	56 Dokumen	56 Dokumen	100 %	100 %	1.935.000	1.935.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10.750.000
3 27 01 2.02 03	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	2.745.000	2.745.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10.750.000
3 27 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Alutansi SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Alutansi SKPD	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	215.000	215.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	10.750.000

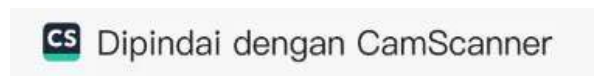


Unit Organisasi : 3.27.0.00.00.32.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.00.00.32.0000

Rencana Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program		Indikator Kinerja	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Tingkat Pencapaian Kinerja	Target	Dana Pagu Indikatif (Rp.)		
		Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepragwalan Perangkat Daerah				Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah
3 27 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarlan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepragwalan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarlan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Administrasi Kepragwalan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Orang	100 %	100 %	13.155,000	4.385,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	24.014.000		
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	190.142		
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	100 %	100 %	65.813,900	47.673,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	55.960,5		
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	100 %	100 %	30.178,100	16.123,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	55.960,50		
3 27 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	240 Dokumen	100 %	100 %	2.190,000	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	1.825.000		
3 27 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan tamu	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	100 %	100 %	2.100,000	1.050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	8.250.000		

Kode	Uraian/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Kalendar Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Tercapainya Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Tingkat Pencapaian Kinerja	Tingkat Pencapaian Kinerja (R.p.)			
							Program	Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah	Sebelum				Setelah		
								Sebelum	Setelah								Sebelum	Setelah
3.27.01.2.06.09	Perencanaan, Penyusunan, dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedia dan Tersedia	12 Laporan	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	100 %	115.782.000	68.162.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	354.479,0			
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedia	1 Unit	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	393.643,0			
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedia	1 Unit	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	143.002,000			
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia	12 Laporan	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	100 %	158.192.750	91.192.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	256.651.500			
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Konsultasi, dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedia	12 Laporan	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	100 %	1.500.000	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	7.341.500,0			
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Konsultasi, dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedia	12 Laporan	100 %	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	100 %	54.692.750	54.692.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	80.758.500			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Tolok Ukur	Tingkat Pencapaian	Pagu Indikatif (Rp.)						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
																	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
27 01 2.09 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	100 %	100 %	36.000.000	102.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	102.480.000	
27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	84 Unit	84 Unit	100 %	100 %	100 %	100 %	121.401.000	248.616.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	504.900.000	
3 27 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	100 %	100 %	21.100.000	21.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	22.000.000	
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirnhabilitasi	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	100 %	100 %	69.344.500	52.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	352.106.000	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN															871.156.300	95.154.000					6.077.269.100
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian															43.680.000	0					382.301.000
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase PELAKSANAAN Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	4 %	4 %	4 %	15 Laporan	15 Laporan	20 %	20 %	20 %	20 %	3.245.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	4 %	14.957.000	

Unit Organisasi : 3.27.0.00.00.32.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.00.32.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kode	Urusan/ Bidang Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan	Tingkat Capaian Kinerja	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	9					
					Sebelum							Setelah				Sebelum
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	Tersedianya ternak tambing PE untuk UPTD Pembibitan dan Pakan ternak	Persentase Penyediaan Benih/Bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4%	4%	902 Ekor	9 Ekor	8%	8%	650,150,000	40,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	4%
3 27 02 2.06 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4%	4%	100 Ton	100 Ton	8%	8%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	4%
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											21,500,000	85,303,000			7,67
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian											14,620,000	85,303,000			7,27
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Perizinan	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Persentase peningkatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4%	4%	0 Unit	0 Unit	4%	4%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Perizinan	4%
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Perizinan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Persentase peningkatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4%	4%	0 Unit	0 Unit	4%	4%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Perizinan	4%
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Perizinan	Tersedianya Karangla Balih	Persentase peningkatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4%	4%	5 Buah	4%	4%	4%	14,620,000	85,303,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Perizinan	4%
3 27 03 2.04	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Perizinan	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Dididentifikasi dan Ditetapkan	Persentase peningkatan Lahan Pengembalaan Umum yang bisa dikembangkan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4%	4%	2 Ha	2 Ha	2%	2%	6,880,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Perizinan	4%
3 27 03 2.04 01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Perizinan	Tersedianya Lahan Pengembalaan Umum yang ditetapkan	Persentase peningkatan Lahan Pengembalaan Umum yang bisa dikembangkan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4%	4%	2 Ha	2 Ha	2%	2%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Perizinan	4%
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER											1,145,260,100	933,149,500			3,930,443,132
3 27 04 2.01	Penjagaan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota											117,900,100	1,900,000			1,340,447,900

3 27 04 2.01 01
 3 27 04 2.01 02
 3 27 04 2.01 03
 3 27 04 2.01 04
 3 27 04 2.01 05
 3 27 04 2.01 06
 3 27 04 2.01 07
 3 27 04 2.01 08
 3 27 04 2.01 09
 3 27 04 2.01 10
 3 27 04 2.01 11
 3 27 04 2.01 12
 3 27 04 2.01 13
 3 27 04 2.01 14
 3 27 04 2.01 15
 3 27 04 2.01 16
 3 27 04 2.01 17
 3 27 04 2.01 18
 3 27 04 2.01 19
 3 27 04 2.01 20
 3 27 04 2.01 21
 3 27 04 2.01 22
 3 27 04 2.01 23
 3 27 04 2.01 24
 3 27 04 2.01 25
 3 27 04 2.01 26
 3 27 04 2.01 27
 3 27 04 2.01 28
 3 27 04 2.01 29
 3 27 04 2.01 30
 3 27 04 2.01 31
 3 27 04 2.01 32
 3 27 04 2.01 33
 3 27 04 2.01 34
 3 27 04 2.01 35
 3 27 04 2.01 36
 3 27 04 2.01 37
 3 27 04 2.01 38
 3 27 04 2.01 39
 3 27 04 2.01 40
 3 27 04 2.01 41
 3 27 04 2.01 42
 3 27 04 2.01 43
 3 27 04 2.01 44
 3 27 04 2.01 45
 3 27 04 2.01 46
 3 27 04 2.01 47
 3 27 04 2.01 48
 3 27 04 2.01 49
 3 27 04 2.01 50
 3 27 04 2.01 51
 3 27 04 2.01 52
 3 27 04 2.01 53
 3 27 04 2.01 54
 3 27 04 2.01 55
 3 27 04 2.01 56
 3 27 04 2.01 57
 3 27 04 2.01 58
 3 27 04 2.01 59
 3 27 04 2.01 60
 3 27 04 2.01 61
 3 27 04 2.01 62
 3 27 04 2.01 63
 3 27 04 2.01 64
 3 27 04 2.01 65
 3 27 04 2.01 66
 3 27 04 2.01 67
 3 27 04 2.01 68
 3 27 04 2.01 69
 3 27 04 2.01 70
 3 27 04 2.01 71
 3 27 04 2.01 72
 3 27 04 2.01 73
 3 27 04 2.01 74
 3 27 04 2.01 75
 3 27 04 2.01 76
 3 27 04 2.01 77
 3 27 04 2.01 78
 3 27 04 2.01 79
 3 27 04 2.01 80
 3 27 04 2.01 81
 3 27 04 2.01 82
 3 27 04 2.01 83
 3 27 04 2.01 84
 3 27 04 2.01 85
 3 27 04 2.01 86
 3 27 04 2.01 87
 3 27 04 2.01 88
 3 27 04 2.01 89
 3 27 04 2.01 90
 3 27 04 2.01 91
 3 27 04 2.01 92
 3 27 04 2.01 93
 3 27 04 2.01 94
 3 27 04 2.01 95
 3 27 04 2.01 96
 3 27 04 2.01 97
 3 27 04 2.01 98
 3 27 04 2.01 99
 3 27 04 2.01 100

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	Tipe Kegiatan	Tipe Anggaran	Tipe Anggaran (Rp.)	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum						Setelah
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah							
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 Laporan	2 %	2 Laporan	117.800.100	1.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 %	9.773.000,000		
3.27.04.2.01.02	Pembahasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Linas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	5 Laporan	2 %	5 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 %	2.770.000,000		
3.27.04.2.01.03	Pengendalian Daerah Terpapak Wabah Penyakit Hewan Menular Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Daerah Terpapak Wabah yang Tertendali	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 Laporan	2 %	2 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 %	2.911.000,000		
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemastikan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	4 Laporan	2 %	4 Laporan	0	760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 %	808.272.700		
3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	4 Laporan	2 %	4 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 %	267.765.300		
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemastikan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemastikan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	4 Laporan	2 %	4 Laporan	29.510.000	760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 %	186.810.000		
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Fasilitas Linas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Fasilitas Linas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	1 Laporan	2 %	1 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 %	152.007.000		

Rencana Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Cakupan Penting	Target	Dana Pagu Indikatif (Rp.)		
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)							
					Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
1 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota															
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota															
3 27 04 2.03 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	Persentase Pelayanan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2 %	2 %	1 Laporan	2 %	1.500,000	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 %	45.895.
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase Pelayanan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	2 %	2 %	12 Laporan	2 %	903.450,000	903.450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 %	895.
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Penyiaran Telnis Kesehatan Masyarakat Veteriner															1.041.999.
3 27 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase penerapan dan pengawasan penyiaran telnis kesehatan masyarakat veteriner	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	2 %	2 %	12 Laporan	2 %	93.000,000	26.139,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 %	520.996,9
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase penerapan dan pengawasan penyiaran telnis kesehatan masyarakat veteriner	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	2 %	2 %	5 Laporan	2 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 %	520.996,9
3 27 06 2.02	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN															224.922.000
	Penerimaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan															186.466.000
	Penatausahaan Penerimaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Penatuaahaan Penerimaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatuaahaan Penerimaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Penerimaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	4 %	4 %	10 Dokumen	4 %	8.000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan, Penyediaan Prasarana Pertanian dan Pengawasan Perizinan	4 %	95.110,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan % Peringkat	Tingkat Capaian Kinerja	Tertarget	Dana Pengeluaran (Rp.)
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Sebelum	Sesudah							
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
3 27 06 2.02 03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi Perizinan	Persentase Peningkatan, Penyediaan Prasarana Pertanian dan Pengawasan Perizinan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi Perizinan	Persentase Pencabutan Izin Usaha Produksi Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	4 %	20 Laporan	4 %	6.600,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan, Penyediaan Prasarana Pertanian dan Pengawasan Perizinan	4 %	90,3	38,45		
3 27 06 2.03	Izin Usaha Penggecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase Peningkatan, Penyediaan Prasarana Pertanian dan Pengawasan Perizinan	Jumlah Izin Usaha Penggecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Persentase Penyediaan Izin Usaha Penggecer Obat Hewan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	4 %	12 Laporan	4 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan, Penyediaan Prasarana Pertanian dan Pengawasan Perizinan	4 %	38,456	952,486,3		
3 27 07 2.01	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Petani dan Kinerja Penyuluh Pertanian	Jumlah Kelembagaan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Dilengkapi Kapasitasnya	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	20 Unit	2 %	8.955,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Petani dan Kinerja Penyuluh Pertanian	2 %	225,068,100	330,533,700		
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Petani dan Kinerja Penyuluh Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Dilengkapi Kapasitasnya	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	50 Unit	2 %	24.625,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Petani dan Kinerja Penyuluh Pertanian	2 %	164,939,500			
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Petani dan Kinerja Penyuluh Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	1 Unit	2 %	11.875,000	760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Petani dan Kinerja Penyuluh Pertanian	2 %				

3.27.0.00.0.00.32.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 3.27.0.00.0.00.32.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Mendapat Pembin g	Tingkat Ukuran Tingkat Ukuran Tingkat Ukuran	Tingkat Ukuran Tingkat Ukuran	Tingkat Ukuran Tingkat Ukuran	Tingkat Ukuran Tingkat Ukuran	Tingkat Ukuran Tingkat Ukuran		
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									Sebelum	Sesudah
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
24 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelembagaan petani dan Kinerja Penyuluh Pertanian	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	1 Unit	1 Unit	2 %	2 %	5,345,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Petani dan Kinerja Penyuluh Pertanian	2 %			73,265,50	
05 Pembentukan dan Peryelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelembagaan petani dan Kinerja Penyuluh Pertanian	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 %	13 Unit	13 Unit	2 %	2 %	0	1,218,664,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Petani dan Kinerja Penyuluh Pertanian	2 %			155,677	
TOTAL											9,649,467,869	8,768,400,754					31,885,905		

BAB IV PENUTUP

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen perencanaan maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) masing masing. Sehubungan dengan ini maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun ini sampai dengan triwulan II, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada triwulan III dan IV.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk enam bulan kedepan, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2023 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun ini.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kedepannya adalah :

1. Fungsi Perbibitan dan Produksi
2. Fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta fungsi Pemasaran Produk Peternakan
3. Fungsi Prasarana dan Sarana Peternakan
4. Fungsi Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Kelembagaan Kelompok
5. Fungsi Kesekretariatan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : September 2023

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Drh. DEVI KUSMIRA

NIP. 19751216 200212 2 003